

TESIS

AKIBAT HUKUM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT (PERTANIAN)
YANG MELAWAN HUKUM OLEH KORPORASI BERDASARKAN
PERUNDANG-UNDANGAN



OLEH:

YOLANDA ADELIA BELLA LESTARI SAM, S.H

NIM. 032024153048

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

MINAT STUDI PERADILAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRANGGA

SURABAYA

2022

AKIBAT HUKUM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT (PERTANIAN)
YANG MELAWAN HUKUM OLEH KORPORASI BERDASARKAN
PERUNDANG-UNDANGAN

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studihukum Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga

Oleh:

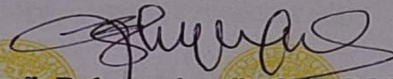
YOLANDA ADELIA BELLA LESTARI SAM, S.H
NIM. 032024153048

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

LEMBAR PENGESAHAN

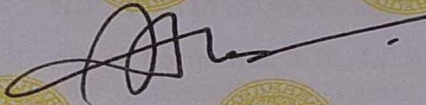
Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 11 Oktober 2022

Dosen Pembimbing Utama :



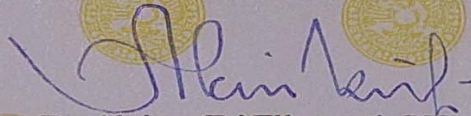
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001

Dosen Pembimbing Kedua :



Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.
NIP. 197111131997022001

Mengetahui:
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M. Hum
NIP. 196401071989032001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal 08 November 2022

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005

Anggota : 1. Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
NIP. 197103041997022001
2. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001
3. Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.
NIP. 197111131997022001
4. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198103132009122002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, S.H.
NIM : 032024153048
Minat Studi : Peradilan
Judul Tesis : Akibat Hukum Pemanfaatan Tanah Ulayat (Pertanian) Yang Melawan Hukum Oleh Korporasi Berdasarkan Perundang-Undangan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 24 Maret 2022

mbuat pernyataan,



Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, S.H
NIM. 032024153048

MOTTO

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya.”

(Surat Al-Baqarah ayat 286)

ABSTRAK

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2). Saat ini pemerintah mendorong perbaikan iklim investasi yang melibatkan pemanfaatan tanah yang substansial seperti pertanian, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam UU Cipta Kerja Pasal 22 menjelaskan pemanfaatan tanah ulayat harus melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat, sebelum diubah dalam UU Cipta Kerja Pasal 22 mencantumkan sanksi pidana namun telah dihapuskan dan diganti dengan sanksi administratif. Sampai saat ini masih ada korporasi yang berupaya menguasai suatu tanah ulayat dengan melawan hukum.

Isu hukum yang diangkat pertama pemanfaatan tanah pertanian berasal dari hak ulayat oleh korporasi yang bertentangan dengan hukum dan kedua pertanggungjawaban hukum terhadap pemanfaatan tanah pertanian yang melawan hukum oleh korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mempetakan arah isi tesis ini dengan menganalisis. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Pemanfaatan tanah ulayat tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat tetapi pihak luar seperti korporasi pun diperbolehkan memanfaatkannya. Korporasi yang telah mendapat izin memanfaatkan tanah ulayat tidak diperbolehkan melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama pada saat musyawarah. Akan tetapi, terkadang pemanfaatan tanah ulayat tidak melalui mekanisme musyawarah, melainkan diberikan langsung kepada korporasi oleh pemerintah. Pertanggungjawaban pidana, kejahatan korporasi terhadap bidang pertanahan masih belum dapat menjerat korporasinya, tetapi hanya manusianya. Padahal pada teori *direct corporate criminal liability* bahwa korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang yang berhubungan erat dengan korporasi itu, sedangkan pertanggungjawaban perdata korporasi telah diatur di dalam BW dan menjadi subjek hukum sehingga dalam lingkup perdata korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Kata Kunci : Korporasi, Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat

ABSTRACT

The existence of civil-law societies is recognized in the constitution of the state of the republic of Indonesia chapter 18 verse (2), where governments today encourage climate improvements in investment involving substantial land use such as agriculture, to promote economic growth. Under Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation chapter 22 explains the use of the ground ulayat by deliberate deliberation with the people of the customary law community, before being amended to chapter 22 Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation stating criminal penalties but has been abolished and replaced by administrative sanction. To this day there are still corporations trying to gain control of ulayat's land by breaking the law.

The first law issue that was raised on the land of agriculture came from the right of ulayat by corporations that conflicted with the law and both law liability to illegal use of farmland by corporations. The research was to plot the general direction of the thesis's content by analyzing. The research method used by normatif law with a constitutional, conceptual, and case study approach. Ulayat's use of land could not only be used by the indigenous legal community but by outsiders such as corporations being allowed to use it. Corporations who have obtained a permit to use the land of ulayat are not allowed to violate a mutually approved agreement during deliberations. Sometimes, however, ground use is not by deliberate mechanism but is given directly to corporations by governments. Criminal accountability, corporate crimes against land still can't ensnare corporate, but only human beings. On direct corporate criminal theory that a corporation can account directly to people associated with the corporation, while civil liability corporate was regulated within the bw and became a subject of the law so that the civil sector of the corporation can be called to account.

Keywords: Corporation, Customary Law Community, Customary Land

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbal'alam

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul AKIBAT HUKUM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT (PERTANIAN) YANG MELAWAN HUKUM OLEH KORPORASI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN dengan baik. Penulis menyadari bahwa tidak mungkin terselesainya tesis ini tanpa bantuan dari berbagai pihak dari para dosen, keluarga dan teman-teman. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan rasa hormat yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA, selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya, beserta para wakil Rektor
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para wakil Dekan
3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih S.H. M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Kuliah II yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau dalam memberikan arahan secara sabar dan penuh ketelatenan dalam membimbing penulis sehingga tesis ini menjadi layak untuk diujikan dan dipertanggungjawabkan.

5. Ibu Dr. Soelistyowati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dan pikiran di tengah kesibukan beliau dalam memberikan bimbingan dan memberikan kritik, nasehat, dan arahan demi tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan layak untuk diujikan.
6. Para Penguji, Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Ketua Penguji dan anggotanya Ibu Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H sekaligus Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Kuliah I dan Ibu Amira Paripurna, S.H.,LL.M.,Ph.D yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam menguji hasil tesis penulis.
7. Ibu Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali, dan seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan.
8. Ibu penulis Munawaroh S.Kep terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan dan memberikan semangat yang luar biasa hingga penulis mampu menyelesaikan tesis dan menyelesaikan Pendidikan S2 seperti sekarang ini. Dan tak lupa Ayah penulis Saneman, S.H. (Alm) dan Kakak penulis Bayu Aditama Bakhtiar Sam (Alm) yang selalu menjadi motivasi penulis.
9. Untuk keluarga besar penulis yang tidak akan pernah putus tali persaudaraannya dan akan selalu terjaga dalam pertemuan maupun doa terima kasih atas segala doa-doanya.

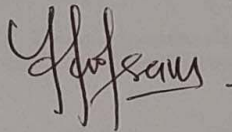
10. Untuk teman dan sahabat penulis, terima kasih banyak atas kebersamaan, dukungan, bantuan, dan doa selama ini yang senantiasa diberikan kepada penulis.
11. Dan seluruh pihak yang belum disebutkan dalam lembaran kertas-kertas ini yang telah membantu terselesaikan tesis yang takkan mungkin menuliskan jasa kalian satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan, ilmu dan pengetahuan sehingga banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan berbagai saran dan kritik dari pihak manapun demi penyempurnaan tesis ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan, pengetahuan dan pemikiran bagi pembaca.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis,



Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek Staatsblad No. 23 Tahun 1848

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1292 K/Pid/2015 atas Nama Terdakwa Ahmad Zirwan Lubis Pgl. Dewan, Zamrudi Pgl. Rudi, dan Azwin, S.H

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 120/Pdt.G/2018/Pn.Son atas Nama Penggugat Tuan Keliopas Momo Melawan Para Tergugat Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Bina Marga, PT. Pulau Lemon, PT. Expra, PT. Retro Hasirindo Consultant, Gubernur Provinsi Papua Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Kerangka Konseptual.....	11
1.6.1 Konsep Masyarakat Hukum Adat.....	11
1.6.2 Konsep Hak Ulayat	16
1.6.3 Konsep Tindak Pidana di Bidang Pertanahan	18
1.6.4 Konsep Pertanggungjawaban Hukum	20
1.6.5 Konsep Korporasi	24
1.7 Metode Penelitian.....	25
1.7.1 Tipe Penelitian Hukum	25
1.7.2 Pendekatan Masalah	26
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	27
1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	28
1.7.5 Analisis Bahan Hukum	28
1.8 Sistematika Penulisan	29
BAB II PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN BERASAL DARI HAK ULAYAT OLEH KORPORASI YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM	31
2.1 Eksistensi Masyarakat Hukum Adat.....	31

2.2	Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	40
2.3	Kedudukan Tanah Pertanian Yang Berasal Dari Hak Ulayat	49
2.4	Pemanfaatan Tanah Pertanian Berasal Dari Hak Ulayat Yang Bertentangan Dengan Hukum.....	53
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN YANG MELAWAN HUKUM OLEH KORPORASI		63
3.1	Pertanggungjawaban Hukum Korporasi	63
3.2	Sanksi Pelaku Pemanfaatan Tanah Pertanian Hak Ulayat Yang Melawan Hukum	78
3.3	Analisis Beberapa Putusan Pengadilan	85
3.3.1	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1292 K/Pid/2015 atas Nama Terdakwa Ahmad Zirwan Lubis Pgl. Dewan, dkk.	85
3.3.2	Analisis Putusan Nomor 120/Pdt.G/2018/Pn.Son atas Nama Penggugat Tuan Keliopas Momo Melawan Para Tergugat Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia. dkk.	90
BAB IV PENUTUP		99
4.1	Kesimpulan	99
4.2	Saran	101
DAFTAR BACAAN.....		102